

Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Masa Pandemi Covid-19

DOI : 10.30595/jhes.v6i1.14678

Arif Rohman¹, Syufaat²

¹Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Email : arifcopper@gmail.com

²Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Email : iainpwtsyufaat@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020 menjadi suatu ujian bagi masyarakat dan pemerintah di mana dampaknya tidak hanya pada terbatasnya aktivitas sosial masyarakat namun juga berdampak terhadap perekonomian global dan domestik. Perekonomian mengalami tekanan baik dari sisi supply karena perusahaan tidak dapat beroperasi secara optimal maupun tekanan dari sisi demand karena mobilitas dan kegiatan ekonomi masyarakat berhenti. Ekonomi dan keuangan secara umum mengalami dampak dari sektor riil yang terdampak pandemi. Namun, keuangan syariah mampu menunjukkan memiliki resiliensi yang baik di tengah pandemi. Industri keuangan syariah secara konsisten tetap mencatatkan pertumbuhan positif hingga akhir tahun 2020. Ketahanan dan kinerja positif industri keuangan syariah tersebut ditopang oleh sejumlah kebijakan dan stimulus dari OJK yang bersifat *pre-emptive*, *extraordinary*, dan *forward looking*, yang didukung dengan kebijakan akomodatif dari Pemerintah dan Bank Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perkembangan industri keuangan syariah di masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Objek penelitian pada penelitian ini adalah perkembangan industri keuangan syariah di masa Pandemi Covid-19 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini terdiri dari reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi dan menyusun hipotesis kerja. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa industri keuangan syariah di masa Pandemi Covid-19 tumbuh positif sebesar 13,82% (yoy) menjadi Rp. 2.050,44 triliun meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.801, 40 triliun. Pasar Modal Syariah yang memiliki porsi terbesar aset keuangan syariah (60,27%) mengalami pertumbuhan tertinggi di antara sektor lainnya dengan laju 14,83% (yoy). Perbankan Syariah dengan pangsa pasar 33,83% dari keuangan syariah tumbuh sebesar 13,94% (yoy). Sementara itu, IKNB Syariah yang memiliki porsi sebesar 5,90% dari total aset keuangan syariah juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,90% (yoy).

Kata-kata kunci : Industri; Keuangan; Syariah; Pandemi; Covid-19

Abstract

The Covid-19 pandemic throughout 2020 became a test for the community and the government where the impact was not only limited to the social activities of the community but also had an impact on the global and domestic economy. The economy is under pressure from both the supply side because companies cannot operate optimally and pressure from the demand side because people's mobility and economic activities stop. The economy and finances in general experienced the impact of the real sector affected by the pandemic. However, Islamic finance is able to show good resilience in the midst of a pandemic. The Islamic finance industry has consistently recorded positive growth until the end of 2020. The resilience and positive performance of the Islamic finance industry is supported by a number of pre-emptive, extraordinary, and forward looking policies and stimulus from the OJK, supported by accommodative policies from the Government. and Bank Indonesia. The purpose of this study is to analyze how the development of the Islamic finance industry during the Covid-19 pandemic. This research is a type of library research. The object of research in this study is the development of the Islamic finance industry during the Covid-19 pandemic. The data collection technique in this study uses documentation techniques. Data analysis in this study consisted of data reduction, data categorization, synthesis and formulating working hypotheses. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the sharia financial industry during the Covid-19 pandemic grew positively by 13.82% (yoy) to Rp. 2,050.44 trillion, an increase from the previous year of Rp. 1801, 40 trillion. The Islamic Capital Market which has the largest share of Islamic financial assets (60.27%) experienced the highest growth among other sectors at a rate of 14.83% (yoy). Islamic banking with a market share of 33.83% of Islamic finance grew by 13.94% (yoy). Meanwhile, Sharia IKNB which has a portion of 5.90% of total Islamic financial assets also experienced growth of 3.90% (yoy).

Keywords: Industry; Finance; Sharia; Covid-19; Pandemic

Pendahuluan

Dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional ke depan, seluruh pelaku jasa keuangan dinilai perlu untuk melanjutkan berbagai upaya dan kebijakan yang mendorong ketahanan dan daya saing keuangan syariah. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah perlu diperkuat, antara lain melalui penguatan kelembagaan, sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, mendorong penguatan infrastruktur keuangan syariah di antaranya melalui digitalisasi produk dan layanan lembaga jasa keuangan syariah, pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, serta meningkatkan awareness pelaku usaha dan masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Hal-hal tersebut terintegrasi dalam suatu ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Di Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah sendiri bermula dari pendirian Koperasi Ridha Gusti di Jakarta dan Baitut Tamwil-Salman di Bandung pada tahun 1980-an. Sistem perbankan syariaah di Indonesia baru dikenal pada tahun 1990 melalui kajian intensif yang dilakukan oleh para ulama dan cendikiawan Muslim yang bergabung dalam organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI). Kedua lembaga ini mengadakan konferensi

dengan tema “sistem perbankan tanpa bunga”. konferensi ini didasarkan atas desakan masyarakat Muslim untuk membentuk suatu bank yang bisa menawarkan produk dan jasa yang tidak mengandung riba. Dan akhirnya pada konferensi yang ke-4 tanggal 22-25 Agustus 1990 disepakati untuk membentuk tim kerja pendirian bank syariah pertama di Indonesia (Nofinawati, 2016). Dalam perkembangannya, kurun waktu tahun 1992-1998, perkembangan bank syariah secara kuantitas kurang membahagiakan. Pada saat itu hanya terdapat satu bank syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi dalam kurun waktu enam tahun. Namun dari segi kualitas, bank syariah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Bank syariah tidak terkena dampak krisis ekonomi Asia pada tahun 1998, sementara bank konvensional justru sebaliknya. Ada sekitar 17 bank konvensional yang mengalami kebangkrutan dan akhirnya harus ditutup demi menghindari dampak serius akibat krisis keuangan pada tahun 1998 tersebut (Rama, 2015).

Meningkatnya industri lembaga keuangan di Indonesia tidak terlepas dari keberadaan penduduk muslim Indonesia yang merupakan mayoritas. Penduduk muslim mayoritas merupakan ukuran pangsa pasar produk dan jasa berbasis ekonomi syariah yang sangat besar. Menurut laporan *Global Islamic Economy Report Indonesia* termasuk ke dalam 10 besar konsumen pada setiap sub sektor dalam industri halal yaitu: 1) peringkat pertama pada *top muslim food expenditure*, peringkat kelima *top muslim travel expenditure*, peringkat ketiga *top muslim apparel expenditure*, peringkat kelima *top muslim media expenditure* dan peringkat keenam *top muslim pharmaceutical expenditure* (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018).

Seiring berjalannya waktu, secara kuantitas perbankan syariah berkembang dengan sangat pesat. Menurut data Statistik Perbankan Syariah per bulan Maret tahun 2019 terdapat: 1) 12 Bank Umum Syariah yang terdiri dari 491 kantor pusat operasional/kantor cabang, 1859 kantor cabang pembantu/unit pelayanan syariah dan 282 kantor kas. 2) 21 Unit Usaha Syariah yang terdiri dari 177 kantor pusat operasional/kantor cabang, 201 kantor cabang pembantu/unit pelayanan syariah dan 66 kantor kas. 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terdiri dari 164 kantor pusat operasional/kantor cabang dan 663 kantor kas (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Maraknya perbankan syariah bukan merupakan fenomena baru dalam dunia bisnis syariah. Hal ini dikarenakan semangat yang tinggi dari berbagai kalangan seperti ulama, akademisi, praktisi untuk membangun perbankan tersebut.

Lembaga keuangan memiliki prinsip-prinsip dalam operasionalnya, antara lain: prinsip keadilan, yaitu imbalan berdasarkan bagi hasil dan tingkat keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah; prinsip kesetaraan, yaitu, nasabah adalah penyimpan dana dan pengguna dana, hak kewajiban, dan risiko serta manfaat bank yang ditanggung adalah prinsip keseimbangan dan ketenangan, yaitu produk perbankan syariah mengikuti

prinsip dan aturan muamalah syariah tanpa riba dan menerapkan zakat untuk aset. Prinsip transparansi, yaitu lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkelanjutan sehingga investor dan klien dapat memahami status keuangan mereka; prinsip universal berarti tidak membedakan ras, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti rahmatan lil alamin (Pratiwi, 2020).

Di Indonesia kasus pertama Covid-19 dimumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 terkonfirmasi positif Covid-19 pada dua warga Depok, Jawa Barat, yang berawal dari suatu acara di Jakarta dimana penderita kontak langsung dengan seorang warga negara asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia. Setelah pertemuan tersebut penderita mengeluhkan demam, batuk dan sesak napas. Serangan Covid-19 pada awal maret 2020 tentu sangat terasa dampaknya, menyikapi pandemi Covid-19 kebijakan mulai dimunculkan, mulai penerapan *Work From Home* (WFH) diantara bentuk upaya yang diserukan dan dilakukan oleh dunia untuk mengurangi penyebaran Covid-19 ini adalah dengan *Social* atau *Physical Distancing*, sampai diberlakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) namun sayangnya, gerakan tersebut berpengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan (Tahliani, 2020).

Salah satu yang terdampak dari adanya Covid-19, yaitu debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berakibat pada kinerja dan kemampuan membayar kewajiban nasabah UMKM pada Bank. Pembiayaan mudharabah sampai pada bulan Juni 2021, berdasarkan data statistik perbankan Syariah merupakan pembiayaan yang cukup banyak disalurkan oleh bank Syariah maupun unit usaha Syariah dibanding dengan pembiayaan lainnya seperti murabahah, musharakah, ijarah, qard atau istishna'. Pembiayaan mudharabah dipergunakan oleh nasabah UMKM maupun nasabah bukan UMKM dalam praktik perbankan Syariah dikarenakan minim risiko baik dari sisi bank Syariah maupun nasabah. Disamping itu, adanya agunan yang mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan nilai dari pembiayaan. Namun pandemi Covid-19 tengah melanda dunia sehingga banyak yang terdampak salah satunya, yaitu nasabah UMKM yang berakibat pada kinerja dan kemampuan membayar kewajiban nasabah UMKM pada bank. Hal ini dikarenakan penjualan menurun, sulitnya bahan baku, distribusi terhambat, permodalan dan produksi terhambat. Hal ini tentunya juga berakibat mengganggu kinerja perbankan baik perbankan konvensional maupun perbankan Syariah (Setiawati, 2021). Masyarakat yang meminjam dana di bank sulit untuk membayar angsuran. Jika hal ini terjadi terus-menerus tentunya akan memberi pengaruh pada tingkat kolektibilitas kredit suatu bank yang akhirnya menjadi pembiayaan bermasalah (Amalia & Adinugraha, 2021).

Pembiayaan bermasalah disebabkan karena ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran. Besarnya pembiayaan bermasalah akan membuat

kerugian pada suatu bank dan pastinya keuntungan yang diperolehpun akan berkurang. Pembiayaan bermasalah sering disebut juga dengan kredit macet, merupakan suatu keadaan yang dijadikan indikator bahwa sebuah bank sedang dalam kategori sehat ataupun tidak, yaitu dilihat dari kualitas pembiayaan yang diberikan nasabah pada suatu bank. Jika pembiayaan yang dikembalikan nasabah baik, maka tingkat kesehatan suatu bank dalam hal pembiayaan dikategorikan baik pula. Namun jika pembiayaan yang dikembalikan nasabah macet, maka tingkat kesehatan suatu bank dalam hal pembiayaan dalam kategori tidak sehat. Terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh nasabah yang tidak mampu membayar angsuran diakibatkan dari menurunnya pendapatan dari usaha nasabah. Agar tidak terjadi lagi pembiayaan bermasalah, bank Syariah harus menjaga kualitas suatu pembiayaan serta menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah untuk menghindari adanya resiko kerugian (Dela & Anggraini, 2021).

Kepala Divisi Perbankan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Yosita Nur Widiyanti mengungkapkan dampak dari pandemi Covid-19 antara lain terjadi peningkatan risiko likuiditas pada bank-bank syariah yang dinilai memiliki kualitas lebih rendah. Terdapat potensi perpindahan dana dari bank dengan kualitas rendah ke tinggi di tengah ketidakpastian. Kemudian, penurunan kualitas aset keuangan baik pembiayaan maupun surat berharga sehingga terjadi penurunan profitabilitas karena peningkatan biaya provisi dan dana. Peningkatan *Non-Performing Financing* (NPF) yang umumnya terjadi pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dibiayai, sementara pembiayaan berbasis konsumtif relatif aman. Terakhir berdampak pada ekspansi bisnis yang sulit seiring dengan perlambatan ekonomi. Namun, dampak tersebut dapat diminimalisir dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), BI (Bank Indonesia), serta otoritas lainnya dalam rangka menangani Covid-19 (Andika & Aldi, 2020).

Meskipun demikian, dalam situasi seperti ini perbankan syariah bisa dikatakan mampu bertahan. Berdasarkan data OJK, perbankan syariah masih menunjukkan pertumbuhan yang positif meski menghadapi situasi pandemi. Begitu pula aspek permodalan yang relatif stabil dan kuat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja Agustus 2020. Dari sisi aset, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (DPK), perbankan syariah mengalami pertumbuhan sebesar masing-masing 11,2 persen, 9,5 persen, 11,7 persen *year on year* (yoy). Tingkat NPF juga mengalami penurunan dikarenakan adanya relaksasi dari OJK serta eksposur perbankan syariah terhadap sektor industri seperti transportasi, akomodasi, dan restoran relatif terbatas (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan

menggunakan literatur baik berupa kitab, buku, catatan maupun hasil penelitian terdahulu (Hasan, 2008) Literatur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terdahulu. Dilihat dari sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengumpulkan data dan menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Dalam hal ini penulis menggambarkan dan menjelaskan tentang perkembangan industri keuangan syariah di masa Pandemi Covid-19. Objek penelitian pada penelitian ini adalah perkembangan industri keuangan syariah di masa Pandemi Covid-19.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum, baik mendukung maupun menolak hipotesis tersebut. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data-data terkait dengan perkembangan lembaga keuangan syariah di masa Pandemi Covid-19. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Menurut Lexy J. Moleong, proses analisis data terdiri dari reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi dan menyusun hipotesis kerja (Moleong, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Dalam masa pandemi, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperhatikan tiga sektor, yaitu kesehatan, sektor riil dan perbankan. Pandemi Covid-19 menjadi permasalahan bagi perbankan, karena bisa menghasilkan permasalahan di sektor riil atau dunia usaha yang berpotensi menimbulkan persoalan di sektor perbankan. Hal ini tentu saja bisa terjadi, dikarenakan sektor perbankan merupakan lembaga intermediasi atau perantara yang mendukung kebutuhan dana investasi bagi dunia usaha. Perbankan syariah di Indoneisa menghadapi sejumlah tantangan di tengah wabah Covid-19. Menurut Pengamat Ekonomi Syariah yang juga pendiri Karim Consulting, Adiwarmar Karim menyampaikan kondisi industri Perbankan Syariah bisa lebih dulu memburuk daripada industri bank konvensional. Di masa pandemi Covid-19 saat ini, perbankan syariah akan menghadapi beberapa kemungkinan resiko, seperti resiko pembiayaan macet (NPF), resiko pasar dan resiko likuiditas. Oleh karenanya, resiko

tersebut pada akhirnya akan memiliki dampak terhadap kinerja dan profitabilitas perbankan Syariah (Ilhami & Thamrin, 2021).

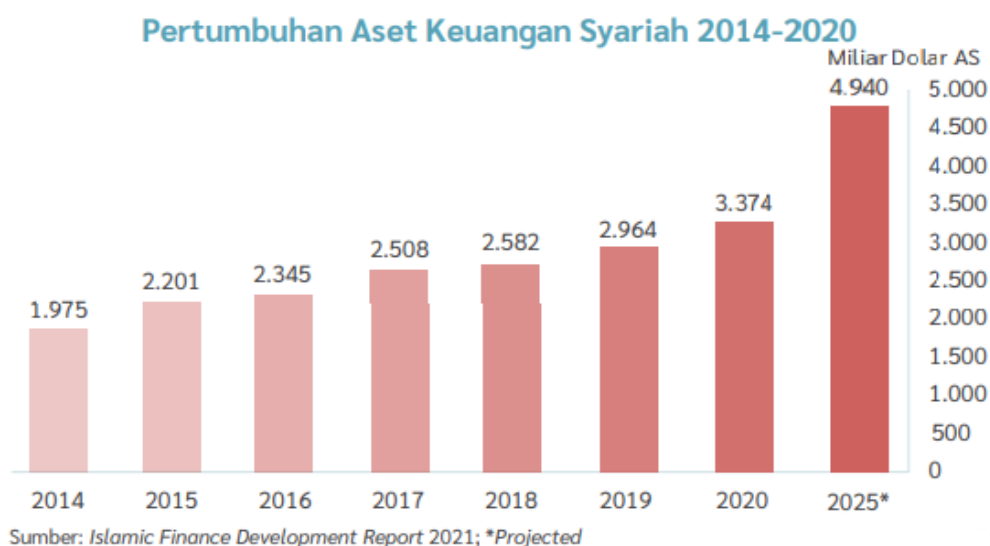
Pada tahun 2021, diperkirakan umat Muslim mengeluarkan US\$2 triliun untuk sektor makanan, farmasi dan gaya hidup yang sesuai dengan prinsip syariah. Nilai tersebut mencerminkan 8,9% pertumbuhan dari tahun sebelumnya dan diperkirakan akan mencapai US\$2,8 triliun pada tahun 2025 (dengan asumsi CAGR 7,5%). Terlepas dari berlanjutnya ketidakpastian ekonomi akibat pandemi, pengeluaran Muslim global 2022 untuk sektor ekonomi syariah diperkirakan tumbuh sebesar 9,1% pada tahun 2022. Seluruh sektor ekonomi syariah (Islamic Finance, Halal Food, Modest Fashion, Media & Recreation, dan Pharma & Cosmetics), kecuali Halal Travel, telah kembali pulih pada akhir tahun 2021, Ekonomi dan Keuangan Syariah Global ke tingkat pengeluaran sebelum terjadinya pandemi. Dampak pandemi Covid-19 pada setahun terakhir terhadap berbagai sektor ekonomi syariah tercatat berbeda-beda. Pengeluaran penduduk Muslim untuk Halal Food dan Modest Fashion tetap positif pada 2020 (+1,5% dan +1%) disaat pengeluaran global untuk sektor tersebut menunjukkan angka yang negatif (-0,9% dan -6,3%) (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Di sisi lain, penurunan pengeluaran baik dari sisi global maupun penduduk Muslim terlihat pada sektor lainnya. Misalnya pada sektor Halal Cosmetics, pengeluaran global tercatat turun sebesar -6,5% selama 2020, namun pengeluaran penduduk Muslim mencatatkan kinerja yang lebih baik, dengan penurunan sebesar -2,3%. Investasi pada ekonomi syariah juga menunjukkan pemulihan dari dampak pandemi COVID-19, ditandai dengan peningkatan 118% dari US\$11,8 miliar menjadi US\$25,7 miliar pada 2020/21. Dari sisi jumlah transaksi untuk investasi ekonomi syariah, seperti merger & acquisition, private equity dan modal ventura juga menunjukkan peningkatan dari 156 transaksi tahun lalu menjadi 210 transaksi di 2020/21. Investasi pada ekonomi syariah ini didominasi oleh 6 (enam) negara, yaitu UEA, Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Mesir dan Turki, dengan masing-masing negara mencatatkan lebih dari 20 transaksi pada tahun tersebut (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Aset keuangan syariah global telah mencapai US\$3,37 triliun pada tahun 2020. Angka tersebut meningkat 13,8% dari tahun sebelumnya yaitu US\$2,96 triliun, menandakan tetap tumbuhnya industri keuangan syariah global meskipun dihantam oleh perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Industri keuangan syariah global diperkirakan dapat terus tumbuh hingga US\$4,94 triliun pada tahun 2025, dengan pertumbuhan rata-rata 8% pada 5 (lima) tahun ke depan. Apabila dilihat dari pertumbuhan masing-masing sektor keuangan syariah, terlihat bahwa hampir seluruh sektor keuangan syariah (perbankan syariah, takaful, sukuk dan reksadana syariah) tetap dapat mencatatkan pertumbuhan double-digit pada 2020. Hanya satu sektor keuangan syariah, yaitu *Other Islamic Financial Institution*, yang

tumbuh kurang optimal, yakni hanya mencatatkan pertumbuhan 1% selama 2020. Pertumbuhan yang kurang optimal ini dipengaruhi oleh jatuhnya harga minyak dan tekanan pada sektor real-estate (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Pandemi Covid-19 mendorong lembaga keuangan syariah untuk berpikir inovatif dalam mengurangi dampak buruk akibat pandemi, seperti percepatan transformasi digital produk dan layanan keuangan syariah. Pandemi juga membuat sektor berbasis teknologi seperti fintech syariah cukup menonjol, ditandai dengan banyaknya kemitraan antara perbankan syariah dan fintech syariah. Selain itu, tren lain yang muncul di kala pandemi adalah tren keuangan syariah yang berkelanjutan, seperti banyaknya penerbitan green sukuk, reksadana syariah berbasis proyek berkelanjutan dan instrumen keuangan hijau lainnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).



Gambar 1. Pertumbuhan Aset Keuangan Syariah 2014-2021
Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2021)

Pada tahun 2020, total aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai US\$119 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar US\$99 miliar. Peningkatan total aset tersebut menempatkan Indonesia pada posisi ke-7 dengan total aset keuangan syariah terbesar di dunia. Peningkatan terbesar berada pada instrumen sukuk dari US\$57 miliar menjadi US\$73 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penggunaan sukuk produk keuangan syariah untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Indonesia merupakan salah satu negara dengan presensi yang kuat untuk industri keuangan syariah, ditandai dengan sektor keuangan syariah Indonesia seperti perbankan syariah, asuransi syariah, sukuk dan reksadana syariah, yang menempati peringkat sepuluh teratas dunia dalam hal total aset. Sektor lain seperti lembaga keuangan non-bank syariah lainnya yang kini belum memiliki cukup presensi pada industri keuangan syariah

global, perlu didorong untuk mengoptimalkan pertumbuhannya. Secara aspek kualitatif, keuangan syariah Indonesia juga masih mencatatkan prestasi yang baik di masa pandemi, dibuktikan dengan mempertahankan peringkat ke-2 dalam Islamic Finance Development Indicator 2021 yang dipublikasikan oleh Islamic Finance Development Report 2021. Sama halnya seperti tahun sebelumnya, peringkat Indonesia di dukung oleh 2 (dua) indikator, pertama adalah Knowledge yang menempati peringkat pertama bersama Malaysia, ditandai oleh jumlah lembaga pendidikan keuangan syariah terbanyak dan merupakan negara ke-2 yang menghasilkan research papers keuangan syariah terbanyak. Indikator kedua adalah Awareness yang menempati peringkat ke-3 setelah Malaysia dan Bahrn, ditandai dengan banyaknya acara seminar dan konferensi yang membahas topik seputar keuangan Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Di tahun kedua pandemi Covid-19 Aset Keuangan Syariah Indonesia Tumbuh 13,82% (yoy) menjadi Rp. 2.050,44 triliun meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.801, 40 triliun. Pasar Modal Syariah yang memiliki porsi terbesar aset keuangan syariah (60,27%) mengalami pertumbuhan tertinggi di antara sektor lainnya dengan laju 14,83% (yoy). Perbankan Syariah dengan pangsa pasar 33,83% dari keuangan syariah tumbuh sebesar 13,94% (yoy). Sementara itu, IKNB Syariah yang memiliki porsi sebesar 5,90% dari total aset keuangan syariah juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,90% (yoy).

Aset Keuangan Syariah	Market Share terhadap Keuangan Nasional	Share terhadap Aset Keuangan Syariah	Aset (Triliun Rp)	Jumlah Institusi/Instrumen
Perbankan Syariah	6,74%	33,83%	693,80	12 Bank Umum Syariah (BUS)
				21 Unit Usaha Syariah (UUS)
				164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
IKNB Syariah	4,25%	5,90%	120,81	59 Asuransi Syariah
				33 Perusahaan Pembiayaan Syariah
				6 Modal Ventura
				10 Dana Pensiun Syariah
				105 IKNB Syariah Lainnya
Pasar Modal Syariah (Tidak termasuk Saham Syariah)	17,37%	60,27%	1.235,83	1 Manajemen Investasi Syariah
				60 Unit Pengelola Investasi Syariah
				69 Sukuk Negara (<i>Outstanding</i>)
				189 Sukuk Korporasi (<i>Outstanding</i>)
				289 Reksadana Syariah (<i>Outstanding</i>)
Total	10,16%	100%	2.050,44	

Gambar 2. Aset Keuangan Syariah

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa industri keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang positif di masa pandemi Covid-19. Dalam upaya menghadapi resesi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh perbankan. *Pertama*, perbankan harus mampu mengidentifikasi dampak Covid-19 terhadap sektor riil, pertumbuhan ekonomi, kinerja nasabah pembiayaan dan aspek lainnya yang memengaruhi kesehatan perbankan. Kemudian, perbankan juga harus menyusun berbagai skenario dampak Covid 19 terhadap perekonomian dan efek rembetan pada kinerja perbankan. *Kedua*, perbankan harus memitigasi risiko kredit dan kecukupan likuiditas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memahami sektor ekonomi dan nasabah pembiayaan terdampak beserta kinerjanya. Perbankan juga harus mengaktifkan sistem peringatan dini dan menyusun skenario restrukturisasi serta upaya penyelamatan nasabah pembiayaan. *Ketiga*, perbankan harus melaksanakan *stress test* kecukupan modal dan likuiditas. Sehingga, perbankan perlu melakukan analisis skenario terhadap kebutuhan dan ketersediaan modal terkait dengan peningkatan risiko kredit. Kemudian, perlu dilakukan identifikasi gap likuiditas dan uji berbagai strategi tersebut. *Keempat*, perbankan juga harus mengoptimalkan pengelolaan portfolio dengan mengidentifikasi portfolio yang rentan terpengaruh dan terdampak. Kemudian, perbankan juga harus optimalisasi alokasi modal dan ketersediaan likuiditas dan terapkan berbagai skenario krisis.

Di masa pandemi Covid-19 industri keuangan syariah harus menggunakan strategi yang tepat agar tetap bertahan. Penelitian yang dilakukan oleh A'yun dan Latifah menyebutkan bahwa industri keuangan syariah melakukan strategi pemasarannya melalui web/platform maupun digital banking ini adalah sebuah kemajuan teknologi dengan menkonversikan layanan melalui digital banking guna kenyamanan dan kemudahan nasabah dalam menerima fasilitas pelayanan bank syariah, kemudian bank syariah melakukan OTS (On The Spot) dengan menggunakan video call/zoom yang digunakan untuk melayani nasabah, kemudian bank syariah bisa melakukan mitigasi risiko yang tepat dalam menghadapi krisis ekonomi pada saat pandemi ini agar cashflow bank terlihat, kemudian bank harus fokus industri perusahaan seperti apa yang akan dibiayai oleh bank (saling menguntungkan atau malah merugikan), kemudian bank syariah dapat melakukan inovasi serta kreativitas bank dimana bank syariah tidak hanya mementingkan pembayaran angsuran, namun bank syariah tetap memperhatikan nasabahnya. Dan bank syariah dapat tetap membantu usaha UMKM dengan memberikan pendampingan serta melakukan konsultasi bersama guna memperbaharui UMKM yang terjangkit COVID-19, yang terakhir bank syariah dapat melakukan pelatihan- pelatihan secara online guna pembelajaran dan menambah wawasan akan bank syariah itu sendiri (A'yun & Latifah, 2021).

Selanjutnya pada penelitian yang dilakukann oleh Trimulato dkk startegi bisnis yang dapat dillakukan oleh industri perbankan syariah dimasa pandemi Covid-19 adalah dengan cara meningkatkan layanan dengan penerapan protokol

kesehatan bagi setiap yang berada di kantor, menjaga jarak dan selalu menggunakan masker. Peningkatan layanan berbasis digital di masa pandemi agar nasabah dapat memenuhi transaksi perbankannya. Fasilitas ATM, *Mobile Banking*, dan *Cash Management System* dalam memenuhi transaksi nasabah di masa pandemi. Untuk pembiayaan dilakukan *recovery* pembiayaan khususnya bagi nasabah yang terkena dampak covid-19. Penawaran dan penetrasi untuk pembiayaan yang baru dengan proses selektif untuk mendapatkan pembiayaan yang berkualitas baik. Serta tetap mengikuti peraturan yang berlaku termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Trimulato et al., 2021).

Simpulan

Industri keuangan syariah di masa Pandemi Covid-19 tumbuh positif sebesar 13,82% (yoy) menjadi Rp. 2.050,44 triliun meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.801, 40 triliun. Pasar Modal Syariah yang memiliki porsi terbesar aset keuangan syariah (60,27%) mengalami pertumbuhan tertinggi di antara sektor lainnya dengan laju 14,83% (yoy). Perbankan Syariah dengan pangsa pasar 33,83% dari keuangan syariah tumbuh sebesar 13,94% (yoy). Sementara itu, IKNB Syariah yang memiliki porsi sebesar 5,90% dari total aset keuangan syariah juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,90% (yoy).

Daftar Rujukan

- A'yun, Q. A. N., & Latifah, F. N. (2021). Strategi Pemasaran Perbankan Syariah Menghadapi Pandemi Covid-19. ... : *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 237–250. <http://103.114.35.30/index.php/Mas/article/view/5167>
- Amalia, R. J., & Adinugraha, H. H. (2021). Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 107–109. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.50>
- Andika, & Aldi. (2020). *Kesiapan Perbankan Syariah dalam Menghadapi Resesi*. <https://Knks.Go.Id/Berita/325/Kesiapan-Perbankan-Syariah-Dalam-Menghadapi>.
- Dela, Y., & Anggraini, T. (2021). Restrukturisasi Pembiayaan di Masa Pandemi Covid-19 pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*.
- Hasan, I. (2008). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Bumi Aksara.
- Ilhami, & Thamrin, H. (2021). Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 37–45. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6068](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6068)
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2018). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*.

- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Remaja Rosda Karya.
- Nofinawati, N. (2016). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 168. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.305>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2020*. [https://www.ojk.go.id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Info-Terkini/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-\(LPKSI\)-2020-.aspx](https://www.ojk.go.id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Info-Terkini/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-(LPKSI)-2020-.aspx).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistik Perbankan Syariah Maret 2022*.
- Pratiwi, D. A. (2020). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 19(3), 10.
- Rama, A. (2015). Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah di Asia Tenggara. *Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 1–25.
- Setiawati, N. U. (2021). Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Nasabah UMKM Akibat Pandemi Coronavirus Dusease 2019 (Covid-19). *Notaire*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ntr.v4i2.26122>
- Tahliani, H. (2020). Tantangan perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Madani Syariah*, 3(2), 92–113. [file:///D:/zinggris literatur/TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH.pdf](file:///D:/zinggris%20literatur/TANTANGAN%20PERBANKAN%20SYARIAH.pdf)
- Trimulato, Supriadi, Mustamin, Umar, S. H., & Ningsih, dan S. (2021). Strategi Bisnis Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1293–1305. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2908DOI:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2908>